
Implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB di SMPN 59 Surabaya

Nikita Putri Purwati¹⁾, Nur Holiso²⁾, Nu'rani Indah Sukmah³⁾, Syunu Trihantoyo⁴⁾, Nubhanudin⁵⁾

^{1,2,3,4,5)}Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya

Email : nikitaputri.23041@mhs.unesa.ac.id
nur.23083@mhs.unesa.ac.id
nuraniindah.23044@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Kebijakan sistem zonasi untuk meningkatkan mutu pendidikan di semua sekolah dan melakukan pemerataan kualitas pendidikan di setiap wilayah dengan adanya sistem zonasi ini kita bisa melihat bahwa tidak ada lagi sekolah unggul atau favorit semua sekolah memiliki layanan pendidikan yang baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolahnya. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deksriptif dengan menggunakan rancangan studi kasus karena informasi tersebut diperoleh dengan kehadiran peneliti secara langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem zonasi PPDB di SMPN 59 Surabaya berjalan dengan efektif dan efisien mereka melakukan kebijakan tersebut berdasarkan sistem dari dinas pendidikan tanpa melakukan perubahan sama sekali. Kepala sekolah memiliki strategi khusus untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan dengan melibatkan tenaga pendidik dan kependidikan untuk mengakomodir segala bentuk kompetensi siswa yang diterima. Dengan adanya sistem zonasi ini menciptakan kesetaraan antar sekolah sehingga semuanya sama dan setara. Dampak dari implementasi kebijakan ini termasuk peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat di daerah terpencil atau kurang berkembang, serta penurunan tingkat persaingan untuk masuk ke sekolah sekolah unggul.

Kata kunci: penerapan kebijakan, manajemen strategi, pengaruh kebijakan

Abstract

The zoning system policy is to improve the quality of education in all schools and to equalize the quality of education in each region. With this zoning system, we can see that there are no longer superior or favourite schools. All schools have good educational services to improve the quality of education in their schools. This research uses a type of descriptive research using a case study design because the information is obtained from the researchers direct presence in the field. The research results show that the PPDB zoning system at SMPN 59 Surabaya runs effectively and efficiently. They carry out this policy based on the system from the education office without making any changes at all. School principals have special strategies to improve the quality and quality education staff to accommodate all forms of student competency received. This zoning system creates equality between schools so that everything is the same and equal. The impact of implementing this policy includes increasing acces to education for people in remote or less developed areas, as well as reducing the level of competition to enter superior schools.

Keywords: policy implementation, strategic management, policy influence

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan bagian penting dari pembangunan. Kelangsungan hidup dan kemajuan suatu bangsa khususnya di Negara negara berkembang ditentukan oleh maju atau tidaknya pendidikan. Oleh karena itu peran pendidikan nampaknya sangat penting bagi bangsa Indonesia pendidikan merupakan landasan kuat yang yang diperlukan bagi keberhasilan suatu bangsa dan sebagai prasyarat untuk menyikapi perkembangan zaman dalam setiap proses, ada dua aspek yang harus dipertimbangkan yaitu pemerataan akses terhadap pendidikan yaitu akses terhadap pendidikan bagi seluruh penduduk yang usianya sudah mencukupi untuk sekolah, keadilan masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang sama yaitu semua suku, agama, dan golongan memperoleh pendidikan secara setara tanpa membeda bedakannya. Dengan adanya pemerataan

kualitas pendidikan di setiap wilayah maka semua anak bisa berkembang dan memiliki pola pikir yang maju sehingga semua anak akan memiliki pengetahuan yang luas untuk menghadapi perkembangan zaman di masa yang akan datang.

Dalam implementasinya sejak tahun ajaran 2019/2020, Kota Surabaya telah menerapkan sistem zonasi, yaitu sistem penerimaan peserta didik baru berdasarkan radius dan jarak meskipun belum seratus persen. Melalui sistem zonasi ini diharapkan semua warga kota Surabaya bisa mendapatkan pendidikan yang lokasinya dekat dengan tempat tinggal (Purwanti et al., 2019). Ketimpangan sistem pendidikan tersebut ditengarai dengan munculnya sekolah sekolah unggul yang hanya bisa diakses terutama oleh masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke atas. Sebaliknya bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah terpaksa hanya mampu menyekolahkan anak anak mereka ke sekolah sekolah dengan tingkat kualitas pendidikan biasa atau rendah. Maka dari itu dinas pendidikan harus mempertimbangkan kondisi mereka yang berkecukupan untuk memberi bantuan anak anak mereka untuk melanjutkan sekolah, dengan adanya sistem zonasi ini dan bantuan untuk anak yang kurang mampu pendidikan mereka bisa seimbang tidak kalah dengan tingkat ekonomi menengah ke atas sehingga pemerataan kualitas pendidikan bisa optimal.

Fakta yang terjadi adalah terciptanya kondisi sekolah dengan predikat sekolah bermutu atau sekolah favorit. Sekolah semacam ini memiliki kriteria atau ciri ciri tertentu dan terkadang tidak memiliki sekolah lainnya yang memiliki potensi dibawahnya (Anggraeni et al., 2022). Sistem PPDB di SMPN 59 Surabaya sejak awal, kebijakan sistem zonasinya ini sudah ditetapkan oleh dinas pendidikan jadi pihak SMPN 59 Surabaya tinggal menerima data yang masuk dari sistem mengenai kebijakan kebijakan dalam penerimaan peserta didik baru agar pemerataan kualitas pendidikannya berjalan dengan baik dan stabil.

Melalui penerapan kebijakan sistem zonasi diharapkan praktik praktik diskriminatif dalam penerimaan peserta didik dapat diminimalisir, sementara aksesibilitas terhadap pendidikan berkualitas meningkat. Namun, implementasi kebijakan ini tidaklah mudah dan menghadapi berbagai tantangan, termasuk infrastruktur pendidikan yang belum merata, distribusi sekolah yang tidak seimbang dan peran serta aktif dari berbagai pemangku kepentingan.

Dalam artikel ini, kami akan mengeksplorasi lebih lanjut tentang penerapan kebijakan sistem zonasi. meliputi konteks, tujuan, strategi pelaksanaan, serta dampaknya terhadap masyarakat dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Dengan memahami secara mendalam tentang penerapan kebijakan ini diharapkan kita dapat merumuskan langkah langkah yang lebih efektif dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi semua anak anak di Indonesia.

METODE PENELITIAN

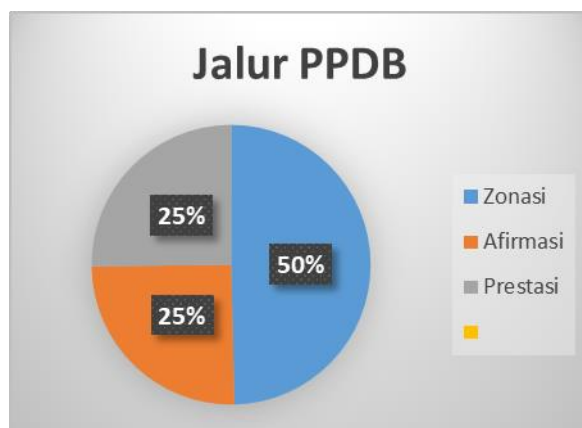
Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Untuk mendalami persepsi dan pengalaman individu terkait dengan kebijakan implementasi penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi. Pendekatan Kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti sesuatu dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, peristiwa, dan dinamika sosial. Dalam penelitian kualitatif, proses dan makna atau perspektif lebih ditonjolkan dan landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deksriptif yang menggambarkan dan meringkas sekumpulan data teknik ini membantu dalam memahami beberapa variasi data yang dimiliki dan membantu menyaring data yang tidak relevan.

Penelitian ini dilakukan di SMPN 59 Surabaya yang beralamat di Jl. Raya Klumprik PDAM no. 59 BalasKlumprik, Wiyung, Surabaya Teknik pengumpulan Data nya melalui proses Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Dalam melakukan wawancara ini melibatkan kepala sekolah, waka kurikulum dan waka kesiswaan, data yang diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk kuantitatif seperti data yang diperoleh dari angket seperti skor jawaban dari pernyataan yang telah dijawab oleh responden tentang implementasi kebijakan sistem zonasi di SMPN 59 Surabaya tersebut agar kita bisa memahami lebih detail tentang kebijakan yang disampaikan oleh responden sejauh ini sudah berhasil apa tidak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan sistem zonasi adalah salah satu upaya pemerintah untuk menghilangkan diskriminasi pendidikan dan mempertajam kualitas pendidikan yang ada di setiap wilayah. Tujuan implementasi sistem zonasi yaitu pemerataan kualitas pendidikan di setiap sekolah yang ada di wilayah kabupaten dan memastikan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak (Wijaya et al., 2020). Pelaksanaan kebijakan sistem zonasi di SMPN 59 Surabaya telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam penerimaan peserta didik baru kepala sekolah melibatkan waka kurikulum untuk ikut terlibat dalam PPDB ini dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi. Mereka menerima data yang masuk dari sistem tanpa merubah kebijakan dari dinas pendidikan. Mereka juga telah menerapkan kurikulum merdeka yang dimana mengakomodir segala bentuk kompetensi siswa yang masuk disini dengan adanya kebijakan sistem zonasi ini sangat menguntungkan SMPN 59 Surabaya karena letaknya yang jauh dari keramaian.

Kebijakan penerimaan peserta didik baru di SMPN 59 Surabaya disajikan dengan Gambar Diagram Lingkaran berikut. Yang dimana jalur zonasi 50% jalur afirmasi 25% dan jalur prestasi 25%.



Gambar 1. Grafik Jalur PPDB di SMPN 59 Surabaya

Dengan adanya kebijakan sistem zonasi yang lebih banyak ini mendekati sekolah dengan domisili siswa dan sudah pasti akan mengalami peningkatan karena pada sistem zonasi ini siswa yang diterima adalah siswa yang domisilinya dekat dengan sekolah. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan akan meningkat juga jika di setiap wilayah menerapkan sistem zonasi ini agar semua lembaga pendidikan bisa berkembang, karena penerapan sistem zonasi berpengaruh positif terdapat korelasi antara penerapan sistem zonasi terhadap penurunan motivasi belajar siswa dalam interal yang rendah secara jelas terlihat merosotnya siswa baik dari segi kualitas maupun kuantitas secara kuantitas karena terhalang oleh sistem zonasi yang mengharuskan sekolah berbasis daerah.

Implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB melibatkan beberapa proses yaitu a. penetapan zonasi. Pemerintah daerah menetapkan batas-batas wilayah zonasi untuk setiap sekolah berdasarkan pertimbangan geografis, demografis dan kapasitas sekolah b. komunikasi kebijakan. Pemerintah daerah dan sekolah mengkomunikasikan kebijakan zonasi kepada masyarakat, orang tua, dan calon siswa melalui berbagai media seperti surat, website, pertemuan orang tua dan sosial media c. registrasi peserta didik. Calon siswa mendaftar ke sekolah yang berada dalam zonasi tempat tinggal mereka dengan melengkapi formulir pendaftaran dan menyertakan dokumen yang diperlukan d. verifikasi dokumen. Sekolah melakukan verifikasi dokumen yang diserahkan oleh calon siswa untuk memastikan kecocokan informasi yang diberikan e. seleksi dan penentuan jumlah penerimaan. Jika jumlah pendaftar melebihi kapasitas sekolah, sekolah dapat melakukan seleksi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, seperti jarak tempat tinggal, prestasi akademik f. pengumuman hasil seleksi. Sekolah mengumumkan hasil seleksi kepada calon siswa dan orang tua, baik secara langsung di sekolah maupun melalui media online g. pembinaan dan penerimaan peserta didik baru. Sekolah memberikan pembinaan kepada peserta didik baru dan orang tua untuk memfasilitasi adaptasi mereka dengan lingkungan sekolah h. evaluasi dan peningkatan. Pemerintah daerah dan sekolah melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB termasuk evaluasi terhadap efektivitas, keadilan dan kecukupan kapasitas sekolah.

Dalam menjalankan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru Kepala sekolah SMPN 59 Surabaya memiliki strategi untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di sekolahnya yaitu dengan keterlibatan tenaga pendidik dan kependidikan untuk menerapkan kurikulum merdeka yang dimana waka kurikulum mengakomodir segala bentuk kompetensi siswa yang masuk disini. Mereka juga mengutamakan gaya belajar siswa dan dikelompokkan sesuai model belajarnya agar mereka bisa belajar dengan maksimal. Kepala sekolah juga berusaha untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana agar pelaksanaan belajar mengajar di sekolah untuk mencapai tujuan pembelajaran serta menunjang hasil peserta didik (Mentor, n.d.). dengan adanya strategi ini maka semua layanan dan fasilitas di setiap sekolah akan sama dan tidak ada lagi sekolah yang unggul, kepala sekolah akan berusaha semaksimal mungkin untuk membuat lembaga nya bisa setara dengan sekolah lain dan menjadi sekolah dambaan peserta didik dan orang tua. Keberhasilan suatu lembaga pendidikan sangat bergantung pada kepemimpinan kepala sekolah bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia di sekolah tersebut. Hal ini dilakukan dengan menetapkan program pembelajaran yang inklusif dan beragam, serta memberdayakan tenaga pendidik dan kependidikan untuk memberikan dukungan yang tepat bagi semua siswa, termasuk mereka yang berasal dari wilayah dengan akses pendidikan yang terbatas. Selain itu, kepala sekolah juga dapat bekerja sama dengan pihak terkait seperti pemerintah daerah dan komunitas setempat untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin menghambat pemerataan pendidikan di zona tersebut. Selain itu ada beberapa strategi yang dapat dipertimbangkan oleh seorang kepala sekolah dalam menghadapi penerimaan peserta didik melalui sistem zonasi yaitu a. komunikasi yang efektif. Memastikan informasi tentang kebijakan penerimaan melalui sistem zonasi disampaikan dengan jelas kepada orang tua dan calon siswa termasuk prosedur, kriteria seleksi, dan jadwal pendaftaran, memperkuat kualitas sekolah b. Fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan fasilitas sekolah untuk meningkatkan daya Tarik bagi calon siswa di setiap wilayah zonasinya c. penyediaan informasi yang lengkap. Menyediakan informasi yang komprehensif tentang profil sekolah, program akademik, ekstrakurikuler, dan prestasi untuk membantu calon siswa dan orang tua dalam memilih sekolah d. membangun kemitraan dengan masyarakat. Melibatkan orang tua, masyarakat dalam mendukung upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah tersebut e. memfasilitasi proses pendaftaran. Menyediakan bantuan teknis dan dukungan kepada calon siswa dan orang tua selama proses pendaftaran untuk memastikan partisipasi yang maksimal f. evaluasi dan peningkatan berkelanjutan. Melakukan evaluasi

terhadap implementasi sistem zonasi secara berkala dan melakukan perbaikan atau penyesuaian jika diperlukan untuk meningkatkan keadilan dan efektivitasnya.

Sistem zonasi memiliki dampak positif dan dampak negatif yang perlu dipertimbangkan. Dampak positif dari system zonasi yaitu pemerataan kualitas pendidikan, system zonasi dapat membantu pemerintahan dalam mendistribusikan kualitas pendidikan secara merata diberbagai wilayah karena setiap sekolah akan menerima siswa diarea terdekat. Pengurangan ketimpangan, dengan membatasi akses ke sekolah-sekolah unggulan kota besar, siswa dari daerah pinggiran juga memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Pemerataan pendidikan, sistem zonasi memudahkan Masyarakat dalam menerima layanan pendidikan sebab itu siapapun bisa bersekolah dimanapun yang mereka mau tanpa takut tidak diterima karena posisinya akan diambil alih oleh calon siswa yang tidak unggul secara akademis. Untuk memfasilitasi akses terhadap peluang pendidikan Selain itu, siswa yang kurang mampu secara ekonomi juga lebih mudah untuk mendaftar karena jarak ke sekolah sangat dekat dan mereka tidak perlu mengeluarkan biaya untuk perjalanan ke lokasi sekolah. upaya pemerintah dalam pengalokasian anggaran seperti penyediaan sarana dan prasarana juga semakin merata. Dampak lain penerapan zonasi adalah menghilangkan segregasi sekolah. Sebelum diberlakukannya zonasi, banyak orang yang menyebut sekolah yang dianggap memiliki siswa yang berbakat secara akademis atau non-akademik sebagai ``sekolah favorit", dan siswa menjadi pilih-pilih sekolah mana yang akan diterima. Hal ini menyebabkan kekurangan siswa. Serta banyak sekolah lainnya. Karena adanya zonasi, tidak ada nilai sekolah favorit dan non-favorit. Dampak negatif dari sistem zonasi adalah kegiatan pendidikan dalam hal belajar mengajar, hal ini menyebabkan terjadinya kekacauan dikelas karena adanya guru-guru tersebut, terutama bagi guru-guru yang mengajar disekolah favoritnya. Penurunan aksesibilitas, siswa yang tinggal di daerah terpencil atau daerah dengan ketersediaan sekolah yang terbatas mungkin kesulitan untuk mengakses pendidikan sekolah di wilayah tersebut. Potensi kesulitan dalam penempatan, sistem zonasi juga dapat menyulitkan penempatan siswa yang ingin bersekolah diluar wilayah zonasi mereka, misalnya jika mereka ingin mengikuti program khusus atau sekolah dengan kurikulum yang lebih sesuai dengan minat dan bakat mereka. Kegiatan belajar mengajar, Zonasi ini menimbulkan kebingungan bagi guru pada saat pembelajaran. Hal ini terutama terjadi pada guru-guru yang mengajar di sekolah favoritnya. Guru-guru ini awalnya berada dalam zona nyaman karena terbiasa mengajar siswa yang sudah kuat baik dalam bidang akademik maupun non-akademik, namun ketika diterapkan kebijakan baru, guru mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Guru harus mempunyai tips dan strategi mengajar yang tepat sesuai dengan kebutuhan. karakteristik siswa yang berbeda-beda, karena guru perlu berusaha lebih keras untuk beradaptasi dengan siswa yang siswanya berbeda-beda. Menurunnya motivasi belajar Pengenalan zonasi juga akan mempengaruhi motivasi belajar anak. Siswa tahu, baik atau buruk nilainya, mereka tetap bisa masuk ke sekolah dekat tempat tinggalnya, sehingga kehilangan motivasi dan semangat bersaing untuk meraih nilai tertinggi, dan calon siswa bersantai. Anda bisa bersantai di sana. Dalam belajar, mereka kurang semangat untuk menjadi yang terbaik di antara teman-temannya. Pemahaman dan implementasi yang cermat diperlukan untuk mengoptimalkan dampak positif sambil meminimalkan dampak negatif dari sistem zonasi pendidikan.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan sistem zonasi di SMPN 59 surabaya telah dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk mempercepat pemerataan pendidikan. Tujuan dari kebijakan sistem zonasi

adalah meningkatkan kualitas pendidikan di setiap wilayah kabupaten pelaksanaan kebijakan sistem zonasi melibatkan beberapa proses termasuk penetapan zonasi, komunikasi kebijakan, registrasi peserta didik, seleksi dan evaluasi. Peran kepala sekolah sangat penting dalam mengoptimalkan sumber daya dan menetapkan program pembelajaran yang inklusif dan diperlukan evaluasi dan peningkatan berkelanjutan terhadap implementasi sistem zonasi untuk memastikan keadilan dan efektivitasnya. Kebijakan sistem zonasi ini membawa dampak positif untuk keberhasilan suatu lembaga pendidikan dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan secara merata. Tidak akan ada lagi sekolah yang lebih unggul atau favorit dalam menentukan sekolah yang akan mereka pilih selanjutnya, kebijakan sistem zonasi ini memberikan peningkatan siswa baru yang jaraknya lebih dekat dari sekolah yang terdekat dari rumahnya, karena sudah pasti mereka akan masuk di sekolah tersebut. Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan sistem zonasi ini peran kepala sekolah sangat penting untuk mengakomodir segala bentuk kompetensi siswa dan mereka pasti memiliki perbedaan yang beragam dalam melakukan pembelajaran. Maka dari itu fasilitas di lembaga pendidikan tersebut juga harus memadai agar bisa membuat proses pembelajaran dengan baik dan dampak negatif dari sistem zonasi yaitu membuat pendidik harus lebih ekstra dalam melakukan proses pembelajaran di sekolah karena tidak hanya ada anak yang unggul tetapi juga ada anak yang kemampuannya dalam akademik dan non akademik biasa saja maka pendidik harus bisa menyesuaikan dengan peserta didiknya agar proses pembelajaran bisa optimal dan mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Sistem zonasi pendidikan memiliki dampak positif seperti pemerataan pendidikan, kemudahan akses, dan penghapusan diskriminasi sekolah. Namun juga terdapat dampak negatif seperti tantangan dalam belajar mengajar bagi guru dan potensi penurunan motivasi belajar siswa. Oleh karena itu penting untuk memperhatikan kedua sisi dalam merancang dan melaksanakan sistem zonasi pendidikan guna mencapai tujuan inklusivitas dan kualitas pendidikan yang merata.

REFERENSI

- Alzizah, E., Wulandari, D. S., Rahim, R., Wulansyah, J., & Duriska. (2022). Pengelolaan Ketidakhadiran Siswa Berbasis Aplikasi di SMK 1 Muhammadiyah Sangatta. *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam*, 4(2), 190–200. <https://doi.org/10.15642/japi.2022.4.2.190-200>
- Anggraeni, A., Helpiastuti, S. B., & Wahono, P. (2022). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMP di Kecamatan Ponorogo. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(5), 5234–5241.
- Hidayah, H. (2024). Zonasi, Strategi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Era Karimun, PPDB Di SMA Negeri 4. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, XII(April), 20–29. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/12874/6706>
- Junaedy, I. K. D., Mardika, I. M., & Yudhiantara, I. M. (2021). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Abiansemal. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 107–115. <https://doi.org/10.22225/pi.6.2.2021.107-115>
- Parameswara, M. C., Iskandar, M. F., & Amelia, R. F. (2022). Pengaruh Kebijakan Sistem Zonasi bagi Sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 9570–9578.
- Purwanti, D., Irawati, I., & Adiwisastro, J. (2018). Efektivitas Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Bagi Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan. *Dinamika*, 5(4), 1–7.
- Purwanti, D., Irawati, I., Adiwisastro, J., & Bekti, H. (2019). Implementation of New Student Admission Policy Based on Zoning System in Bandung City. *Jurnal Governansi*, 5(1), 12–23.
- Ulum, M. M., Afifah, S. N., Fajar, G., & Putra, A. (2023). *Dampak Penerapan Sistem Zonasi Terhadap*

Motivasi Belajar Siswa. 6(2), 534–542.

Widyastuti, R. T. (2020). Dampak Pemberlakuan Sistem Zonasi Terhadap Mutu Sekolah Dan Peserta Didik. *Edusaintek : Jurnal Pendidikan, Sains Dan Teknologi*, 7(1), 11–19.
<https://doi.org/10.47668/edusaintek.v7i1.46>

Wijaya, C., Fuadi, A., & Hasibuan, S. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Langkat. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 12(1), 162. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v12i1.16463>

Winarti, N., Rahmi, K., & Charin, R. O. P. (2023). Harapan Pemerataan Menghadirkan Kesenjangan: Analisis Dampak Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Tanjungpinang. *Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 49(2), 210–225.
<https://doi.org/10.33701/jipwp.v49i2.35793246>